

Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Fitri Angreini*, Kartika Rachma Sari, Yevi Dwitayanti
Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia
*Corresponding Author: fitriangreini25@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of income and financing on district/city capital expenditures in South Sumatra Province from 2018 to 2020. Researchers used secondary data from the website of the Directorate General of Fiscal Balance and the Supreme Audit Agency of South Sumatra Province. Thirty samples used in this study were determined by purposive sampling. Multiple linear regression and descriptive statistics were used to test the data using SPSS. Based on the results of the study, it can be said that partially PAD and transfer income have an effect on capital expenditure, while other legitimate regional income, financing receipts, and financing expenditures have no effect on capital expenditure. Simultaneously, PAD, transfer revenue, other legitimate regional revenues, financing receipts, and financing expenditures have a positive and significant effect on capital expenditures.

Keywords: Capital Expenditure, Financing, Regional Income

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan dan pembiayaan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peneliti menggunakan data sekunder dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Tiga puluh sampel digunakan dalam penelitian ini yang ditentukan secara *purposive sampling*. Regresi linier berganda dan statistik deskriptif digunakan untuk menguji data menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa secara parsial PAD dan pendapatan transfer berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh pada belanja modal. Adapun secara simultan, PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pembiayaan, Pendapatan Daerah

©IJAAF 2022 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Pendahuluan

Belanja daerah memiliki peranan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintah yang termasuk dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan wajib, kegiatan pilihan, dan kegiatan yang pengelolaannya dapat dibagi pada pemerintah pusat dan daerah tatkala pada keadaan tertentu. Perihal keuangan daerah, serta kekuatan daerah untuk menyelidiki sumber keuangannya sendiri dan transfer dari pusat berdampak signifikan terhadap belanja daerah di tiap-tiap daerah. Hak untuk menjalankan kegiatan secara mandiri diberikan kepada daerah berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus yang berasal dari pajak dan pendapatan sumber daya alam. Selain dana perimbangan, pemerintah daerah memiliki sumber keuangan sendiri berupa pendapatan asli daerah, keuangan daerah, dan pendapatan lainnya. Pemerintah pusat memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sesuai pada kebijakan otonomi daerah. Peningkatan belanja modal yang signifikan bagi pemerintah daerah menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah mengalokasikan jumlah yang signifikan untuk belanja modal karena pentingnya pembangunan infrastruktur.

Belanja modal merupakan komponen anggaran pemerintah daerah yang berasal dari belanja langsung dan menghasilkan output berupa aset tetap, yang sebagian digunakan langsung oleh masyarakat dan sebagian lagi tidak. Pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan daerah melalui belanja modal yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan lingkungan untuk investasi. Belanja modal yang sebenarnya sedang dilakukan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan publik.

Belanja modal adalah belanja yang dapat mendorong ekspansi ekonomi yang sebenarnya. Sebagai hasil dari peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi barang dan jasa, infrastruktur yang dibiayai oleh belanja modal akan membantu perekonomian bergerak lebih cepat. Namun dalam praktiknya, realisasi belanja modal di akhir tahun sering kali tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBD. Pemerintah harus memprioritaskan belanja modal di atas belanja konsumtif, terutama untuk pembangunan infrastruktur, karena belanja modal merupakan investasi karena keuntungan yang diberikan bersifat jangka panjang. Belanja konsumtif tentu akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun hanya

dalam jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang akan ditingkatkan dengan belanja untuk pembangunan infrastruktur.

Pendapatan asli daerah (PAD) ialah kekayaan yang berasal dari sumber asli daerah yang sah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber asli daerah lainnya. Hal tersebut termasuk pada undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PSAP No. 3 ayat 8 adalah pendapatan dari satu entitas pelapor yang mendapat uang atau kemampuan untuk menerima uang dari perusahaan pelapor lain sebagaimana diprasyarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah lainnya yang sah, yang mencakup hibah, dana darurat, dan pendapatan lain yang sah, adalah pendapatan yang diperoleh di luar pendapatan asli daerah dan ditransfer ke daerah.



(Data dikelola oleh peneliti)

Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan

Berdasarkan Gambar 1, anggaran belanja modal kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Anggaran belanja modal kabupaten/kota sebesar Rp. 5.570.129.206.998,32 pada tahun 2018 dan Rp. 7.112.239.591.352,03 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan anggaran sebesar Rp 5.346.413.314.163,15. Jika dibandingkan dengan proporsi realisasi penggunaan anggaran 2018-2020, meningkat dari 82,02 persen pada 2018 menjadi 86,58 persen pada 2019, dan 87,30 persen pada 2020.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 paragraf 51 dan 54, seluruh penerimaan yang dilakukan dalam bentuk pinjaman, penjualan obligasi, pendapatan dari penjualan BUMD, pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan aset tetap lainnya, dan penerimaan dari dana cadangan adalah semua dianggap sebagai penerimaan pembiayaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 paragraf 55 dan 57, semua pengeluaran pada rekening kas umum daerah, seperti pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pinjaman pokok dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu, dan pembentukan cadangan, dianggap sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penelitian ini mengkaji PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan untuk melihat apakah berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, baik secara parsial maupun simultan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang memfokuskan pada pengujian hipotesis dengan mengukur variabel penelitian dan melakukan analisis statistik pada data yang dikumpulkan. Menurut Chandrarin (2017:122), “data kuantitatif adalah kategori data yang berbentuk bilangan dan diturunkan melalui perhitungan fitur pengukuran masing-masing variabel.” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel.

Variabel terikat yang dilambangkan dengan huruf Y adalah belanja modal yang merupakan salah satu dari dua variabel yang digunakan pada penelitian ini. PAD (X1), pendapatan transfer (X2), lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3), penerimaan pembiayaan (X4), dan pengeluaran pembiayaan (X5) merupakan variabel bebas yang dilambangkan dengan huruf X.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:80), istilah "populasi" mengacu pada generalisasi suatu wilayah yang terbagi dari hal-hal atau topik yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sampai dengan 2020. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mengungkapkan secara lengkap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang

diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (Tabel 1).

Tabel 1. Daftar Sampel

No.	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kota Palembang
2.	Kota Lubuk Linggau
3.	Kabupaten Banyuasin
4.	Kabupaten Ogan Ilir
5.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
8.	Kabupaten Musi Rawas Utara
9.	Kabupaten Muara Enim
10.	Kabupaten Musi Banyuasin

Data Diolah, 2022

Teknik Analisis Data

Uji statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda digunakan dalam proses analisis data untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan SPSS versi 26 for Windows dan Microsoft Excel untuk menguji hipotesis. Berikut persamaan regresi berganda dalam penelitian ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y	=	Belanja Modal
X1	=	Pendapatan Asli Daerah
X2	=	Pendapatan Transfer
X3	=	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
X4	=	Penerimaan Pembiayaan
X5	=	Pengeluaran Pembiayaan
a	=	Nilai Konstanta
b1	=	Koefisien regresi dari variabel X1
b2	=	Koefisien regresi dari variabel X2
b3	=	Koefisien regresi dari variabel X3
b4	=	Koefisien regresi dari variabel X4
b5	=	Koefisien regresi dari variabel X5
e	=	eror

Uji Koefisien Determinasi

Alat untuk menilai seberapa berhasil model persamaan regresi dibangun adalah koefisien determinasi. Sejauh mana kontribusi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen berfungsi sebagai pengukur kualitas model. R² adalah singkatan dari koefisien determinasi.

Uji Hipotesis

Uji parsial (Uji T) berfungsi untuk menguji apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap belanja modal. Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk memastikan bahwa pengaruh simultan antara semua variabel X terhadap variabel Y.

3. Hasil Penelitian dan Diskusi

Suatu model regresi linier harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) untuk dapat disebut sebagai model yang layak. Agar persamaan regresi yang dihasilkan bernilai valid, sejumlah asumsi perlu dipenuhi agar kriteria BLUE dapat dicapai. Berdasarkan hasil pengujian, semua asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam penelitian ini telah terpenuhi.

Uji normalitas yang memeriksa variabel independen dan menentukan apakah variabel dependen memiliki distribusi normal dengan nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov bernilai lebih dari 0,05. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance mendekati 1 dan nilai VIF kurang dari 10 sehingga bebas dari gejala multikolinearitas. Uji autokorelasi yang dilakukan dengan tes Durbin-Watson (DW Test) dengan menggunakan kondisi $DW > Du$ dan $DW < 4-Du$ menunjukkan tidak terdapat autokorelasi antara variabel yang diteliti.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.888 ^a	.788	.744	137.52955	2.071

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pembiayaan (X5), Pendapatan Asli Daerah (X1), Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3), Pendapatan Transfer (X2), Penerimaan Pembiayaan (X4)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dengan melihat tabel di atas, hasil Adjusted R Square menunjukkan 74,4 persen varians belanja modal dapat dideskripsikan oleh fluktuasi lima variabel independen yang digunakan karena variabel independen yang digunakan lebih besar dari dua variabel sebesar 0,744. Sedangkan faktor lain di luar cakupan model penelitian bertanggung jawab atas sisa porsi (100% - 74,4% = 25,6%).

Uji Parsial

Tujuan dari uji parsial adalah untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji signifikansi variabel (Uji T).

Tabel 3. Uji Parsial (T-Test)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	91.253	75.147		1.214	.236
	Pendapatan Asli Daerah (X1)	.367	.131	.387	2.800	.010
	Pendapatan Transfer (X2)	.157	.065	.402	2.417	.024
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3)	.272	.261	.157	1.044	.307
	Penerimaan Pembiayaan (X4)	.097	.349	.056	.278	.784
	Pengeluaran Pembiayaan (X5)	.737	.728	.140	1.012	.321

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel X1 sebesar 2.800, X2 sebesar 2.417, X3 sebesar 1.044, X4 sebesar 0.278, dan X5 sebesar 1.012 bernilai positif, sehingga setiap variabel X dapat dianggap memiliki pengaruh yang menguntungkan pada variabel Y.

Selain itu, signifikansi dinilai untuk nilai koefisien regresi linier berganda untuk variabel bebas. Ho ditolak jika nilai signifikan < 0,05, sedangkan Ha diterima jika nilai signifikan > 0,05. Dilihat dari signifikansi PAD sebesar 0,010 serta pendapatan transfer sebesar 0,024 yang menunjukkan bahwa Ho ditolak karena signifikansinya < 0,05, tidak semua dari kelima variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi variabel tersebut signifikan. Akibat nilai signifikan > 0,05, maka Ha diterima, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,307, penerimaan pembiayaan

0,784, dan pengeluaran pembiayaan 0,321. Persamaan di bawah ini menggambarkan hal tersebut.

$$Y = 91.253 + 0.367 X_1 + 0.157 X_2 + 0.272 X_3 + 0.097 X_4 + 0.737 X_5 + e$$
$$\text{Belanja Modal} = 91.253 + 0.367 \text{ PAD} + 0.157 \text{ PT} + 0.272 \text{ LLPD} + 0.097 \text{ Pen.Pem} + 0.737 \text{ Peng.Pem} + e$$

Keterangan

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
PT	=	Pendapatan Transfer
LLPD	=	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pen.Pem	=	Penerimaan Pembiayaan
Peng.Pem	=	Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan persamaan di atas, dapat ditentukan bahwa konstanta 91,253 menunjukkan bahwa rata-rata belanja modal adalah 91,253 jika variabel independen diasumsikan konstan. PAD memiliki koefisien regresi sebesar 0,367, artinya belanja modal akan bertambah 0,367 untuk setiap kenaikan PAD. Jika nilai ini negatif, di sisi lain belanja modal akan turun sebesar 0,367. Pendapatan transfer memiliki koefisien regresi sebesar 0,157, artinya belanja modal akan bertambah 0,157 untuk setiap kenaikan pendapatan transfer. Jika hasilnya negatif, sebaliknya belanja modal akan turun 0,157. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah mempunyai koefisien 0,272, menyatakan belanja modal akan bertambah 0,272 untuk setiap penambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jika hasilnya negatif, sebaliknya belanja modal akan turun sebesar 0,272. Penerimaan pembiayaan memiliki koefisien sebesar 0.097. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan penerimaan pembiayaan, maka belanja modal akan bertambah sebesar 0.097. Sebaliknya, jika angka tersebut negatif, maka belanja modal akan menurun sebesar 0.097. Pengeluaran pembiayaan yang memiliki koefisien sebesar 0.737 menunjukkan setiap kenaikan pembiayaan, maka belanja modal meningkat sebesar 0.737. Sebaliknya, jika angka tersebut negatif maka belanja modal akan menurun 0.737.

Jika dilihat dari tabel signifikansi terlihat bahwa pendapatan asli daerah sebesar $0,010 < 0,05$ berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, dan pendapatan transfer sebesar $0,024 < 0,05$ berpengaruh positif. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, sebaliknya, tidak mempunyai pengaruh pada belanja modal karena nilainya signifikan ($0,307 > 0,05$), penerimaan pembiayaan juga tidak terpengaruh ($0,784 > 0,05$), dan pengeluaran pembiayaan tidak terpengaruh ($0,321 > 0,05$).

Uji Simultan

Pengujian simultan dilakukan dengan menggunakan uji F-statistik (bersama-sama) untuk menentukan apakah model regresi yang dikembangkan benar-benar memenuhi persyaratan.

Tabel 4. Uji Simultan (F-Test)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1690877.892	5	338175.578	17.879	.000 ^b
	Residual	453945.051	24	18914.377		
	Total	2144822.943	29			

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pembiayaan (X5), Pendapatan Asli Daerah (X1), Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3), Pendapatan Transfer (X2), Penerimaan Pembiayaan (X4)

Dilihat dari Tabel 4, F hitung sebesar 19.014 menurut tabel sebelumnya, sedangkan nilai F tabel adalah 3,40, yang diperoleh dengan menggunakan tabel F dengan melihat df1 (5) dan df2 (24). Sementara df2 dihasilkan dari $n-k$, df1 diperoleh dari $k-1$, di mana k adalah jumlah total variabel independen dan dependen. Berdasarkan temuan ini, hipotesis alternatif diadopsi karena semua faktor mempengaruhi belanja modal secara bersamaan dan nilai F hitung $>$ dari nilai F tabel. Model regresi kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan belanja modal jika signifikan pada tingkat 0,000 sampai 0,05, atau dapat dikatakan bahwa PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan semua memengaruhi belanja modal secara kolektif.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal provinsi kabupaten/kota. Tentunya pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera di samping melaksanakan pemerintahan sendiri di daerah. Otonomi daerah telah memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah untuk menggali potensi yang ada di daerahnya dan memungkinkan mereka untuk mandiri secara finansial untuk pembangunan daerahnya sendiri. Perolehan pendapatan asli daerah akan meningkat karena semakin banyak potensi kekayaan daerah yang

ditemukan sehingga memungkinkan peningkatan belanja modal.

Pada penelitian Rahmadewi (2018) ditemukan bukti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal yang terkait dengan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Studi ini memberikan dukungan untuk temuan penelitian ini. Hasibuan dan Tiara (2021) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel pendapatan transfer mempengaruhi belanja modal secara signifikan. Hal ini dikuatkan oleh penelitian sebelumnya, khususnya penelitian Rahmadewi (2018) yang menemukan bahwa pendapatan transfer mempengaruhi belanja modal karena berperan penting dalam pelaksanaan desentralisasi, mendorong belanja modal daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah lebih efektif dalam memproduksi dan menyediakan barang publik. Dalam penelitian Rahmadewi (2018), pendapatan transfer yang dirinci menjadi DAK, DAU, dan DBH mengungkapkan bahwa DAK berpengaruh positif dan cukup besar terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif, serta DBH tidak memiliki pengaruh. Dana perimbangan berpengaruh pada belanja modal menurut penelitian Hasibuan dan Tiara (2021). Hal ini menunjukkan bahwa komponen yang berbeda dari pendapatan transfer memiliki pada belanja modal baik secara positif maupun negatif. Selain itu, penelitian Suparta (2021) menunjukkan bahwa dana perimbangan mempengaruhi belanja modal.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, belanja modal tidak dipengaruhi oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap sumber pendapatan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), salah satunya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Dengan memiliki lain-lain pendapatan daerah yang sah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan prospektif lainnya di masa depan dan dengan demikian memperoleh lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam jumlah yang lebih besar memungkinkan peningkatan belanja modal.

Penelitian ini tak sependapat dengan penelitian Rahmadewi (2018) yang menemukan bahwa pendapatan daerah lain yang sah secara signifikan

mempengaruhi belanja modal, yaitu semakin tinggi pendapatan daerah lainnya yang sah, semakin tinggi realisasi belanja modal. Namun, penelitian ini sependapat dengan penelitian Suparta (2021) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah lain yang sah secara signifikan mempengaruhi belanja modal. Tetapi, penelitian ini didukung dan konsisten dengan penelitian Nurdiwaty (2017) yang menegaskan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak memiliki pengaruh atas distribusi anggaran pada belanja modal.

Pengaruh Penerimaan Pembiayaan terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, artinya apabila ingin meningkatkan belanja modal pada maka penerimaan pembiayaan juga harus meningkat. Dengan harapan semakin besar penerimaan pembiayaan yang terdiri dari penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah maka akan semakin besar pula realisasi belanja modal.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rahmadewi (2018) yang menemukan bahwa belanja modal dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan pembiayaan. Hal ini disebabkan perbedaan lokasi penelitian antara peneliti sebelumnya dan peneliti sekarang. Rahmadewi (2018) melakukan penelitian di Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan.

Namun, penelitian Simamora (2014) juga mendukung hal ini. Temuan menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian Martini, dkk. (2021) mengklaim bahwa penerimaan pembiayaan berpengaruh pada belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan pembiayaan dapat berpengaruh apabila menggunakan variabel belanja daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, tidak terdapat pengaruh antara pengeluaran pembiayaan terhadap belanja modal. Artinya jika ingin menaikkan belanja modal, harus juga menaikkan pengeluaran pembiayaan. Diperkirakan belanja modal akan semakin besar realisasinya dengan semakin tingginya pengeluaran pembiayaan. Hal ini didukung oleh penelitian Simamora (2014) yang menemukan bahwa pengeluaran pembiayaan berpengaruh pada belanja daerah dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Belanja Pembiayaan terhadap Belanja Daerah dalam

Perspektif Teoritis”. Hal ini membuktikan bahwa pengeluaran pembiayaan dapat berpengaruh apabila menggunakan variabel belanja daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Modal

Di Provinsi Sumatera Selatan, belanja modal kabupaten dan kota dipengaruhi secara signifikan oleh PAD, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan, sesuai dengan analisis temuan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmadewi (2018) terhadap PAD, pendapatan transfer, dan penerimaan pembiayaan untuk realisasi belanja modal, serta Hasibuan dan Tiara (2021) tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan variabel pendapatan asli daerah (X1) dan pendapatan transfer (X2) secara parsial memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap variabel belanja modal kabupaten/kota. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan meningkatkan belanja modalnya secara proporsional dengan PAD dan pendapatan transfer. Secara parsial variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3), variabel penerimaan pembiayaan (X4), dan variabel pengeluaran pembiayaan tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (X5).

Di Provinsi Sumatera Selatan, variabel PAD, variabel pendapatan transfer, variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, variabel penerimaan pembiayaan, dan variabel pengeluaran pembiayaan semuanya secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel belanja modal kabupaten/kota. Pengaruh positif menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan asli daerah lainnya, pendapatan pembiayaan, dan belanja pembiayaan semua meningkat di Provinsi Sumatera Selatan secara proporsional dengan dampaknya terhadap belanja modal kabupaten/kota.

Daftar Pustaka

Afiah, N., Mulyani, S., & Alfian, A. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi*. Jakarta: Kencana.

- Amin, F. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Arman, & Prahara, S. (2021). *Analisis Pemerintah Daerah*. Gorontalo: CV Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, R. O., & Rusdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Fahrezi, F., Hasanah, N., & Ulupui, I. K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 141-157.
- Fauzi, F., Dencik, A., & Asiati, D. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, N. F., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 4(2), 127-140.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Lupiyoadi, R. &. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Martini, R., Sari, K. R., Firdaus, M. S., & Zaliah. (2021). Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan: Ditinjau dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(1), 53-62.
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43-59.
- Rahmadewi, D. E. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Penerimaan Pembiayaan dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 108-118.
- Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *e Jurnal Katalogis*, 5(7), 169-180.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.

- Siagian, A. O. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Transfer terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 141-158.
- Simamora, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan terhadap Belanja Daerah dalam Perspektif Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 258-271.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK, dan DBH terhadap Alokasi Belanja Modal: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu Periode 2012-2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826-839.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparta, A. (2021). Pengaruh Realisasi Pendapatan Aset Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur. *Kindai*, 17(1), 055-064.
- Susanti, S., & Fahelvi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- _____. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. (2019). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. (2020). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.